

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar tahun 2021. LKjIP merupakan dokumen yang menjadi salah satu komponen dari siklus akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan penyusunan LKjIP.

LKjIP yang disusun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar tahun 2021 serta dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar tahun 2021 ini, adalah perwujudan akuntabilitas kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja, melalui LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program, sehingga dalam perumusan kebijakan dan program kedepan dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Selain itu, melalui LKjIP ini akan dapat dicermati kendala yang ada dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan dimasa mendatang.

Kami menyadari bahwa LKjIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat masih banyak kendala yang dihadapi baik dalam pengumpulan data dari hasil pelaksanaan kegiatan, data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya, untuk itu saran perbaikan dan pendampingan dari instansi pembina sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKjIP dimasa-masa mendatang.

Demikian LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar tahun 2021, diharapkan semua pihak yang mendukungnya mampu melakukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya peningkatan pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga LKjIP ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman serta ditindaklanjuti oleh semua pihak.

Blitar, 28 Februari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Blitar



MOKHAMAD SIDIK, S.Sos, M.AP

NIP. 196611171992021002

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan pedoman penyusunan pelaporan kinerja Pemerintah Kota Blitar didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2021 mengacu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Rencana Kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2021 serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kota Blitar Tahun 2021.

B. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Berpedoman pada arah pembangunan daerah Kota Blitar sebagaimana termuat dalam RPJPD Kota Blitar 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2016-2021 tersebut, dan berbagai capaian pembangunan periode 2010-2015 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Dinas P3AP2KB Kota Blitar lima tahun ke depan serta tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB yang melaksanakan visi, misi, program Walikota dan Wakil Walikota terpilih (2016-2021), maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis menuju Kota Blitar lebih baik dan lebih sejahtera.

1. VISI

Visi Pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada tahun 2016-2021 adalah “MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021”

2. MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan “MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021” tersebut, ditempuh semboyan “One For All, All For One” yang dimaknai dimana satu untuk semua, semua untuk satu adalah masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan seluruh hasil pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan, maka atas dasar makna misi dimaksud serta berlandaskan kepada makna visi Kota Blitar yang telah ditetapkan, terdapat 6 (enam) misi Kota Blitar periode 2016-2021 dimana Dinas P3AP2KB merupakan SKPD yang mendukung dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi Kota Blitar, kesinambungan dan keterkaitannya dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.

Misi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan kualitas kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dan dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan indikator kinerjanya adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

- b) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berbasis pada Sistem Pelayanan Berkualitas dan Partisipatif

Misi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran meningkatkan pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana dan dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan di Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan indikator kinerjanya adalah Angka Pertumbuhan Penduduk.

- c) Meningkatkan Keharmonisan Sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso. Misi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan

tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram, dengan sasaran menurunnya kasus KDRT dan trafficking, dan dilaksanakan melalui Program dan kegiatan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan indikator kinerjanya adalah Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan KDRT dan Kasus Perempuan dan Anak.

Guna menjawab isu-isu strategis, serta tantangan Dinas P3AP2KB Kota Blitar, maka perlu ditetapkan kinerja utama dan indikator kinerja utama yang kemudian diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	36,15 %
2	Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,22
3	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2
4	Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %
5	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis/Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis sesuai dengan kegiatan, program, kebijakan, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Capaian

kinerja tiap-tiap kinerja utama pada tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PREDIKAT
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	36,15 %	42,54 %	117,67 %	Sangat Berhasil
2	Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,22	1,06	115 %	Sangat Berhasil
3	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2	2,13	93,50 %	Sangat Berhasil
4	Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	100 %	100 %	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	100 %	100 %	Sangat Berhasil

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 105,23 %.

D. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2021, dalam rangka pencapaian kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp. 4.230.994.891 dari total anggaran sebesar Rp. 5.935.941.609 atau sebesar 80,42% dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	36,15 %	42,54 %	117,67 %	745.536.900	725.616.320	97,32 %
Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,22	1,06	86,88 %	3.314.737.100	2.134.336.771	64,39 %
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2	2,13	93,50 %	302.900.900	285.930.200	94,39 %
Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	100 %	100 %	500.368.600	259.625.160	51,88 %
Meningkatnya penanganan	Persentase penanganan	100 %	100 %	100 %	458.946.240	238.091.160	51,88 %

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak						
JUMLAH					5.322.489.740	3.643.599.611	68,45 %

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem dan tata kelola administrasi instansi pemerintah diarahkan pada terselenggaranya *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap satuan kerja dalam mewujudkan aspirasi masyarakat serta merealisasikan tujuan sebagaimana telah dirumuskan dalam visi dan misi organisasi satuan kerja. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan sah. Sejalan dengan itu maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan mengedepankan azas berdayaguna, berhasil guna, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta dengan menerapkan azas kepastian hukum, azas proporsionalitas, azas profesionalitas, azas transparansi dan azas akuntabilitas.

Azas kepastian hukum adalah adanya jaminan bahwa setiap penyelenggara negara akan dikenai sanksi (administratif dan atau hukum) apabila terbukti melanggar peraturan perundangan dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Azas proporsionalitas mengacu pada pengertian rentang tanggung jawab pelaksanaan tugas setiap penyelenggara negara berbanding lurus dengan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Azas profesionalitas berarti perwujudan pelaksanaan tugas setiap penyelenggara negara berdasarkan keahlian dan ketrampilan sesuai latar belakang pendidikannya.

Azas transparansi adalah azas yang mengedepankan keterbukaan dan kemudahan akses terhadap berbagai sumber informasi bagi para pemangku kepentingan sebagai bentuk partisipasi dalam memberikan masukan dan kontrol atas kinerja satuan kerja.

Azas akuntabilitas adalah azas yang mensyaratkan bahwa setiap penyelenggaraan program kegiatan harus dapat dihitung dan diukur secara kualitatif maupun kuantitatif serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu cara untuk mengetahui apakah azas-azas tersebut telah dilaksanakan serta sejauh mana tingkat capaian kinerja satuan kerja dalam melaksanakan program kegiatannya adalah dengan memantapkan sistem pelaporan yang baku, menyeluruh, terukur dan memiliki bobot analisis yang tinggi. Sistem dimaksud dikenal dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud pertanggungjawaban satuan kerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P3AP2KB Tahun 2021 merupakan laporan kinerja yang didukung pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan pada Rencana Kerja PD Tahun 2021 yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021. Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2021 yang disampaikan ini merupakan tahapan tahun ke enam Rencana Strategis tahun 2016 – 2021. Oleh karena itu, pencapaian kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 ini didasarkan pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja PD Tahun 2021 serta target pembangunan akhir periode Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) dijelaskan pada Bab II Pasal 2 adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar No 63 tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar bahwa Dinas P3AP2KB Kota Blitar merupakan unsur pendukung tugas Walikota Blitar dipimpin seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar .

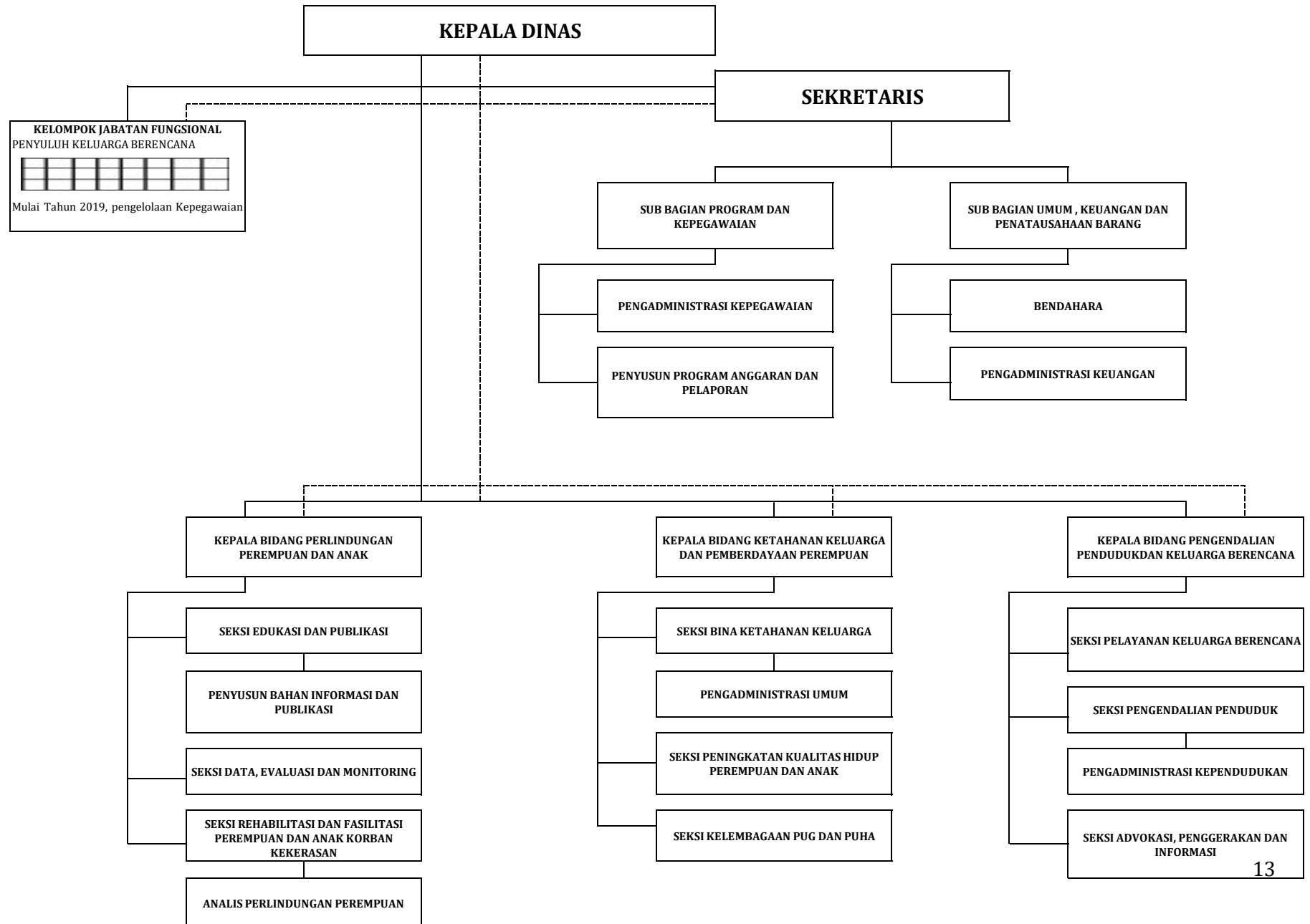
Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas P3AP2KB Kota Blitar melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
6. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
7. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
8. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (spp) dan standar operasional prosedur (sop);
9. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (spip);
10. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (ikm) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
11. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara berkala melalui *sub domain website* pemerintah daerah;

13. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana ; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Struktur dan bagan organisasi Dinas P3AP2KB dapat dilihat seperti dibawah ini :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atau capaian kinerja instansi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah untuk menilai, mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran yang dinilai berdasarkan tolok ukur dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan dan menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025 ;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2021;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar.
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2021.

E. ASPEK – ASPEK STRATEGIS

Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan di berbagai bidang baik bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial, budaya dan pelayanan publik yang ditujukan demi kesejahteraan rakyat. Dinas P3AP2 dan KB Kota Blitar dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan urusan wajib pelayanan non dasar yaitu Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana. Dalam pemenuhan harapan tersebut, Dinas P3AP2 dan KB Kota Blitar memiliki aspek-aspek strategis yang

dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kendala-kendala dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan antara lain :

1. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan
2. Meningkatkan pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana
3. Meningkatkan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak

F. ISU – ISU STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Blitar, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar sebagai berikut:

1. Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Blitar
2. Masih rendahnya partisipasi perempuan dan pembangunan
3. Masih maraknya Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (KDRT, Pelecehan Seksual, Traficking dan kasus perempuan dan anak lainnya) yang terjadi di Kota Blitar
4. Prosentase Pertumbuhan penduduk masih tinggi
5. Prevalensi KB Aktif masih perlu ditingkatkan
6. Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan pada wanita usia subur masih tinggi (diatas rata- rata Jawa Timur)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Blitar termuat dalam Dokumen Renstra PD yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, yang disusun berpedoman kepada RPJMD, Visi dan Misi Pembangunan Kota Blitar dan bersifat indikatif.

Visi Pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada tahun 2016 – 2021 adalah :**“MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui semboyan “One For All All For One” yang dimaknai dimana satu untuk semua semua untuk satu adalah masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan seluruh hasil pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai berikut:

1. Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Cerdas dan Berdaya Saing Tinggi
3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan
4. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berbasis pada Sistem Pelayanan Berkualitas dan Partisipatif
5. Meningkatkan Keharmonisan Sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso
6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional

Berpedoman pada visi, misi dan arah pembangunan daerah Kota Blitar sebagai mana termuat dalam RPJPD Kota Blitar 2005-2025 dan RPJMD tahun 2016-2021 tersebut, DP3AP2KB Kota Blitar menetapkan Rencana Strategis 2016 –

2021 yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan DP3AP2KB Kota Blitar lima tahun kedepan, sehingga terwujud pembangunan yang berkesinambungan sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis menuju Kota Blitar lebih baik, dan lebih sejahtera.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas P3AP2KB menunjukkan bagaimana cara Dinas P3AP2KB mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas P3AP2KB dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB. Strategi dan arah kebijakan Dinas P3AP2KB ditunjukkan sebagai berikut:

VISI Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021			
MISI III	Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatkan partisipasi aktif perempuan (gender) dalam pembangunan daerah	Peningkatan partisipasi dan perlindungan hak-hak perempuan dalam pembangunan daerah
MISI IV	Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Meningkatkan cakupan keluarga berencana dan sejahtera	Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan sejahtera
MISI V	Meningkatkan Keharmonisan sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Optimalisasi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dalam Penanganan Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak)

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Implementasi penjabaran Rencana Strategis dalam rangka mencapai kinerja DP3AP2KB Kota Blitar, dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Perjanjian Kinerja ini didasarkan kepada Rencana kinerja Tahunan yang didalamnya memuat indikator kinerja beserta targetnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala DP3AP2KB Kota Blitar tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Kepala DP3AP2KB Kota Blitar TA. 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	36,15 %
2	Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,22
3	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2
4	Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA / SASARAN

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam implementasi system AKIP, Dinas P3AP2KB Kota Blitar berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan/atau sasaran.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021, realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2020), serta realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RENSTRA 2016-2021. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja dengan kriteria, yaitu :

NO	NILAI CAPAIAN KINERJA		PEMBERIAN ATRIBUT
	%	KETERANGAN PROSENTASE	

NO	NILAI CAPAIAN KINERJA		PEMBERIAN
	%	KETERANGAN PROSENTASE	ATRIBUT
1	85 % - 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARAKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2021

Pengukuran kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2021 menggunakan metode seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2021 ditunjukkan dalam tabel berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	36,15 %	42,54 %	117,67 %
2	Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,22	1,06	115 %
3	Menurunnya Total	Total Fertility Rate	2	2,13	93,50 %

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	(TFR)			
4	Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	100 %	100 %
5	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	100 %	100 %

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 – 2021

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	36,15 %	36,15 %	42,17 %	42,54 %	117,07 %	117,67 %
Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,22	1,22	0,67	1,06	145,08 %	115 %
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2	2	2,14	2,13	93 %	93,5 %
Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2020	TAHUN 2021
perempuan dan anak	perempuan dan anak						

Dari perbandingan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Persentase capaian target kinerja “persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan” mengalami penurunan realisasi dan capaian target pada tahun 2021 ini. Namun, persentase capaian target mencapai 90% sehingga termasuk dalam kategori Sangat Berhasil.
2. Capaian indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) mengalami penurunan, namun telah memenuhi target capaian yaitu mencapai 115%.
3. Capaian indikator Total Fertility Rate (TFR) mengalami peningkatan dari semula 93% menjadi 93,5%.
4. Capaian indikator kinerja terselesaikannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu mencapai 100% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan komitmen Dinas P3AP2KB dalam bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Meskipun berbagai permasalahan yang terjadi, namun tetap dapat mencapai target yaitu penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S/D AKHIR PERIODE RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2021 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2016-202 ditunjukkan dalam tabel berikut :

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s/d AKHIR PERIODE RENSTRA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	36,15 %	42,54 %	117,67 %
Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,22	1,06	86,88 %
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2	2,13	93,50 %
Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	100 %	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa capaian indikator kinerja yang telah mencapai lebih dari target yang ditentukan pada akhir periode Renstra, namun terdapat pula capaian indikator kinerja yang belum mencapai 100 %.

4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL

Perbandingan realisasi kinerja daerah dengan realisasi nasional pada tahun 2021 ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI THN 2021	REALISASI NASIONAL/ REALISASI SPM	KET. (+/-)
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	32,67 %	-	Tidak ada target nasional
Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,06	-	Belum release
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2,13	-	Belum release
Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	-	Tidak ada target nasional
Meningkatnya penanganan kasus	Persentase penanganan kasus	100 %	-	Tidak ada target nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI THN 2021	REALISASI NASIONAL/ REALISASI SPM	KET. (+/-)
kekerasan terhadap perempuan dan anak	kekerasan terhadap perempuan dan anak			

Target SPM (Standar Pelayanan Minimal) hanya diatur sampai tahun 2015, sedangkan mulai tahun 2016 dan seterusnya, OPD hanya menyajikan data SPM sesuai indikatornya saja. Pada Dinas P3AP2KB ada 2 SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang harus disajikan datanya, yaitu SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan bidang Keluarga Berencana. Data capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang Keluarga Berencana pada tahun 2020-2021 antara lain :

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TARGET SPM TAHUN 2020 dan 2021
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR DAN NILAI SPM	REALISASI DAERAH	
		2020	2021
Penanganan pengaduan / laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 %	100 %
Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu	0,00 %	0,00 %

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR DAN NILAI SPM	REALISASI DAERAH	
		2020	2021
	tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS		
Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100 %	100 %
	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	100 %	100 %
Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	100 %
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100 %	100 %

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR DAN NILAI SPM	REALISASI DAERAH	
		2020	2021
Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100 %	100 %
	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100 %	100 %

Sedangkan data capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2020-2021 antara lain :

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR DAN NILAI SPM	REALISASI DAERAH	
		2020	2021
Komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera (KIE KB dan KS)	Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)		
	Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (65%)	74,31 %	
	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) (5%)	9,09 %	
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%)	93,71 %	
	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha	93,71 %	

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR DAN NILAI SPM	REALISASI DAERAH	
		2020	2021
	peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)		
	Ratio petugas lapangan keluarga berencana/penyuluhan keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	127,27 %	
	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap Desa/Kelurahan	100,00 %	100,00 %
Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100,00 %	100,00 %
Penyediaan Informasi Data Mikro	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	100,00 %	100,00 %

Dari 2 tabel capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) diatas diketahui bahwa capaian indikator kinerja SPM (Standar Pelayanan Minimal) terus mengalami peningkatan yang baik meskipun tidak secara signifikan. Dan beberapa indikator terjaga kestabilan pencapaiannya.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas P3AP2KB Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tahun 2021, jumlah anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.401.972.016	3.278.898.842	96,41 %
2	Belanja Langsung	5.935.941.609	4.230.994.891	71,04 %
JUMLAH		9.337.913.625	7.509.893.733	80,42 %

Adapun khusus untuk anggaran dan realisasi belanja langsung program / kegiatan tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
I	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan	199.212.900	196.254.600	98,52 %
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga	54.450.900	54.261.400	99,65 %
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	32.909.300	30.773.500	93,51 %
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	111.852.700	111.219.700	99,43 %
II	Program Perlindungan Perempuan	458.946.240	238.091.160	51,88 %
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	22.435.540	14.538.660	64,80 %

	Kabupaten / Kota			
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	237.753.200	42.188.200	17,74 %
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	198.757.500	181.364.300	91,25 %
III	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	546.324.000	529.361.720	96,90 %
1	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesenjangan	30.784.800	30.604.800	99,42 %
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	515.539.200	498.756.920	96,74 %
IV	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	51.170.000	49.892.700	97,50 %
1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	51.170.000	49.892.700	97,50 %
V	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	221.723.500	145.490.100	65,62 %
1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia	70.030.900	51.492.200	73,53 %
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	151.692.600	93.997.900	61,97 %
VI	Program Perlindungan Khusus Anak	278.645.160	114.135.060	40,96 %

1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	92.085.860	84.694.760	91,97 %
2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	156.651.500	0	-
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak	29.907.800	29.440.300	98,44 %
VII	Program Pengendalian Penduduk	138.474.500	132.970.400	96,03 %
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi	62.836.600	60.689.500	96,58 %
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	75.637.900	72.280.900	95,56 %
VIII	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.314.737.100	2.134.336.770	64,39 %
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian	368.839.400	308.012.733	83,51 %
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	519.562.700	463.020.250	89,12 %
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat	2.232.680.800	1.195.705.187	53,56 %

	Kontrasepsi			
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan	193.654.200	167.598.600	86,55 %
IX	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	164.426.400	152.959.800	93,03 %
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan	119.366.400	111.292.200	93,24 %
2	Pelaksanaan dan Peningkatan Serta Organisasi Kemasyarakatan	45.060.000	41.667.600	92,47 %
X	Program Penunjang Urusan	562.281.809	537.502.581	95,59 %
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.445.600	44.671.700	98,30 %
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.589.000	37.039.000	98,54 %
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.788.400	23.250.500	93,80 %
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.330.800	168.553.497	98,38 %
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.284.309	67.338.304	90,65 %
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	208.843.700	196.649.580	94,16 %

	Pemerintah Daerah			
JUMLAH		5.935.941.609	4.230.994.891	80,42 %

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang terealisasi sebesar Rp 4.230.994.891 dari total anggaran Rp 5.935.941.609 atau sebesar 80,42%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dari Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2021 termasuk cukup tinggi.

1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Langsung pada Dinas P3AP2KB Tahun 2021 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Alokasi Pada Tiap Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	796.706.900	775.509.000	97,33 %
2	Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	3.314.737.100	2.134.336.771	64,39 %
3	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	302.900.900	285.930.200	94,39 %
4	Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	500.368.600	259.625.160	51,88 %
5	Meningkatnya	Persentase	458.946.240	238.091.160	51,88 %

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
	penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak			

2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sedangkan pencapaian kinerja dan anggaran Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2021 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	36,15 %	42,54 %	117,67 %	745.536.900	725.616.320	97,32 %
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan yang terlibat dalam organisasi atau Lembaga kemasyarakatan	16,12 %	16,12 %	100 %	199.212.900	196.254.600	98,52 %
	Jumlah Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen PPRG	12 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	100 %			
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perempuan yang aktif pada organisasi atau Lembaga kemasyarakatan	16,12 %	16,12 %	100 %	546.324.000	529.361.700	96,90 %
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan	Persentase perempuan yang aktif pada	16,12 %	16,12 %	100 %	51.170.000	49.892.700	97,50 %

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Anak	organisasi atau Lembaga kemasyarakatan						
Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,22	1,06	86,88 %	3.314.737.100	2.134.336.771	64,39 %
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase angka Kesertaan ber-KB atau CPR (contraceptive prevalence rate)	75,25 %	75,25 %	100 %	3.314.737.100	2.134.336.771	64,39 %
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2	2,13	93,50 %	302.900.900	285.930.200	94,39 %
Program Pengendalian Penduduk	Capaian Median Usia Nikah Pertama Wanita	21 tahun	21 tahun	100 %	138.474.500	132.970.400	96,30 %
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase anggota Tribina dan UPPKS yang menjadi peserta KB	94,60 %	94,60 %	100 %	164.426.400	152.959.800	93,03 %
Terselesaikannya Kasus	Persentase penyelesaian	100 %	100 %	100 %	500.368.600	259.625.160	51,88 %

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
kekerasan terhadap perempuan dan anak	kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak						
Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase OPD yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	100 %	100 %	100 %	221.723.500	145.490.100	65,62 %
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase OPD yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	100 %	100 %	100 %	278.645.100	114.135.060	40,96 %
Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	100 %	100 %	458.946.240	238.091.160	51,88 %
Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan	100 %	100 %	100 %	458.946.240	238.091.160	51,88 %

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	penanganan oleh petugas terlatih						

3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	117,67 %	97,33 %	1,02
2	Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	86,88 %	64,39 %	1,34
3	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	93,50 %	94,39 %	1,00
4	Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	51,88 %	1,92
5	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	51,88 %	1,92

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Sasaran Strategis 1 : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran “Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan” tingkat efisiensi kinerja di banding penyerapan anggaran sebesar 1.02 dan dapat dikatakan telah

efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 117,67% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 97,33%.

2. Sasaran Strategis 2 : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran “Menurunnya rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar” tingkat efisiensi kinerja di banding penyerapan anggaran sebesar 1.34 dan dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 86,88% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 64,39%.
3. Sasaran Strategis 3 : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran “Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) per perempuan usia reproduksi” tingkat efisiensi kinerja di banding penyerapan anggaran sebesar 1.00 dan dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 93,50% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 94,39%.
4. Sasaran Strategis 4 : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran “Terselesaikannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak” tingkat efisiensi kinerja di banding penyerapan anggaran sebesar 1.92 dan dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 51,88%.
5. Sasaran Strategis 5 : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran “Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak” tingkat efisiensi kinerja di banding penyerapan anggaran sebesar 1.92 dan dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 51,88%.

C. PRESTASI / PENGHARGAAN

Selama tahun 2021 ini tidak banyak perlombaan yang diadakan baik oleh tingkat Pemerintah Kota, Provinsi maupun Nasional. Namun, ada beberapa penghargaan yang sebelumnya tertunda, pada tahun 2021 dapat terlaksana, yaitu :

1. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan kategori Madya
2. Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dengan kategori Madya

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama tahun 2021. Laporan ini juga akan dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat Langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja di masa-masa mendatang.

Dalam beberapa hal yang telah disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar pada tahun 2021 termasuk dalam kategori sangat berhasil. Hal ini dikarenakan capaian kinerjanya rata-rata 105,23%, walau dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala/permasalahan namun terdapat solusi yang telah dan akan dilaksanakan untuk menyelesaikannya. Adapun uraian capaian indikator sasaran strategis sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan” dengan indikator kinerja persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan telah tercapai 42,54% dengan capaian kinerja sebesar 117,67% dengan kategori **Sangat Berhasil**.
2. Sasaran Strategis “Menurunnya rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar” dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk dapat tercapai sebesar 1,06. Dengan demikian capaian kinerja sebesar 86,88% dengan kategori **Sangat Berhasil**.
3. Sasaran Strategis “Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) per perempuan usia reproduksi” dengan indikator kinerja Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,13. Dengan demikian capaian kinerja sebesar 93,50% dari target 2, dengan kategori **Sangat Berhasil**.

4. Sasaran strategis “Terselesaikannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak” dengan indikator kinerja persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, telah tercapai sesuai target yaitu 100% dengan capaian kinerja 100% dengan kategori **Sangat Berhasil**.
5. Sasaran Strategis “Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak” dengan indikator kinerja presentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, telah tercapai sesuai target yaitu 100% dengan capaian kinerja 100% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

B. LANGKAH PERBAIKAN

Langkah-langkah perbaikan yang dilakukan oleh Dinas P3AP2KB Kota Blitar untuk pencapaian indikator kinerja utama kedepan, antara lain :

1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2022 akan lebih memperhatikan strategi pelaksanaannya. Mengingat, status pandemic Covid-19 belum dicabut sepenuhnya, sehingga pencapaian atas tujuan dan sasaran Renstra Dinas P3AP2KB, kegiatan masih harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.
2. Pada tahun 2022 nanti akan dilaksanakan kajian Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagai upaya peningkatan kelembagaan PUG serta peningkatan analisis atas anggaran responsif gender.

Demikian semoga Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2021 dapat sebagai evaluasi untuk perbaikan di masa depan, serta masukan bagi segenap pihak yang berkepentingan.